

Jurnal
YUDISIAL

Vol. 13 No. 3 Desember 2020 Hal. 267 - 408

“DOCUMENTARY EVIDENCE”



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jurnal Yudisial merupakan majalah ilmiah yang memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Jurnal Yudisial terbit berkala empat bulanan di bulan April, Agustus, dan Desember.

Penanggung Jawab: Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.

Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

Redaktur:

1. Raden Adha Pamekas, S.Kom., M.SI.
2. Untung Maha Gunadi, S.H., M.H.

Penyunting:

1. Imran, S.H., M.H. (Hukum Pidana)
2. Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. (Hukum Tata Negara)
3. Muhammad Ilham, S.H. (Hukum Administrasi Negara)
4. Ikhsan Azhar, S.H. (Hukum Tata Negara)
5. Atika Nidyandari, S.H. (Hukum Dagang)
6. Nurasti Parlina, S.H. (Hukum Pidana dan Perdata)

Sekretariat:

1. Priskilla Siregar, S.Sos.
2. Noercholysh, S.H.
3. Wirawan Negoro, A.Md.
4. Didik Prayitno, A.Md.
5. Eka Desmi Hayati, A.Md.

Desain Grafis
dan Fotografer:

1. Arnis Duwita Purnama, S.Kom.
2. Widya Eka Putra, A.Md.

Alamat:

Sekretariat Jurnal Yudisial Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906189

Email: jurnal@komisiyudisial.go.id

Website: www.jurnal.komisiyudisial.go.id

“DOCUMENTARY EVIDENCE”

Dalam memutus suatu perkara, hakim harus berdasarkan alat bukti yang diperiksa di hadapan pemeriksaan persidangan. Walaupun keyakinan hakim berperan penting dalam menentukan putusan, namun keyakinan hakim tersebut haruslah tetap didukung alat bukti yang sah. Salah satu alat bukti yang sah adalah alat bukti surat (*documentary evidence*). Alat bukti surat (*documentary evidence*) merupakan alat bukti utama di semua tingkat peradilan. Kedudukan alat bukti surat bisa berbeda, tergantung peradilan apa alat bukti surat tersebut digunakan.

Alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBG, yaitu: surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan hakim. Alat bukti tertulis atau surat atau akta dalam hukum acara perdata suatu yang utama, sebab hukum acara perdata menekankan pembuktian secara formil.

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Di dalam KUHAP sendiri tidak diberikan definisi yang jelas terkait dengan alat bukti surat (*documentary evidence*). Melainkan hanya memberikan penjelasan bahwa surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah (Pasal 187 KUHAP).

Macam-macam alat bukti yang digunakan dalam pembuktian berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu alat bukti surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan keyakinan hakim. Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, dan petunjuk.

Dari sini kita dapat mengambil benang merah, bahwa kedudukan alat bukti surat itu penting sekali dalam proses persidangan. Terutama dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Begitu krusialnya alat bukti surat, dalam *Jurnal Yudisial* edisi kali ini, ada lima tulisan yang membahas terkait alat bukti surat. Satu naskah membahas tentang notaris, yang notabene merupakan pihak yang dapat mengeluarkan surat atau akta secara resmi atau autentik.

Menarik untuk dicermati bahwa alat bukti surat masih menjadi perdebatan dalam proses pembuktian. Sistem administrasi negara yang masih belum rapi sering kali juga menjadi penyebab terjadinya permasalahan terkait surat di masyarakat. Belum lagi dengan perkembangan teknologi, alat bukti surat dalam bentuk elektronik menjadi permasalahan baru dalam proses hukum di Indonesia. Karena masyarakat masih belum familiar terhadap aturan dalam dunia maya.

Selain kelima tulisan tersebut, dua tulisan lainnya membahas tentang anak dan pidana. Kontroversi anak sebagai pesakitan dalam perkara pidana nampaknya masih menarik untuk dibahas. Sebagai penutup, besar harapan redaksi agar tulisan dalam edisi *Jurnal Yudisial* kali ini dapat memberikan masukan dan khazanah keilmuan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Selamat membaca!

Tertanda

Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial

INTERPRETASI MAHKAMAH KONSTITUSI**TERKAIT UJI KONSTITUSIONAL PASAL 66****UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS 267 - 288**

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012,
72/PUU-XII/2014, 22/PUU-XVII/2019 dan 16/PUU-XIII/2020

Iskandar Muda

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta

PENAFSIRAN HUKUM TENTANG PENGIKATAN PERJANJIAN**JUAL BELI BERDASARKAN SURAT KETERANGAN TANAH 289 - 309**

Kajian Putusan Nomor 93/Pdt.Bth/2017/PN.Bpp

Ardiansyah

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Balikpapan

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DAN**PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA 311 - 327**

Kajian Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg

Muhamad Sadi Is

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, Palembang

AKTA PKR DARI RUPS LUAR BIASA**YANG MENGANDUNG PERBUATAN MELAWAN HUKUM 329 - 350**

Kajian Putusan Nomor 45/Pdt/2014/PTR

Shinta Pangesti

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang

PERLINDUNGAN ANAK YANG BERMASALAH**DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF****PEMIDANAAN INTEGRATIF PANCASILA 351 - 372**

Kajian Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg
dan 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw

Warih Anjari

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta

MENALAR KEADILAN RESTORATIF**DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA****DENGAN TERDAKWA ANAK 373 - 390**

Kajian Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi

Arifai

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari

PENGUATAN SISTEM PERADILAN PIDANA

MELALUI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN

SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN 391 - 408

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015

Riki Afrizal

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

JURNAL YUDISIAL

p-ISSN 1978-6506/e-ISSN 2579-4868

Vol. 13 No. 3 Desember 2020

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Muda I (Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta)

Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Konstitusional Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, 72/PUU-XII/2014, 22/PUU-XVII/2019 dan 16/PUU-XIII/2020

Jurnal Yudisial 2020 13(3), 267 - 288

Uji konstitusional Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, baik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 maupun perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, setidaknya sampai saat ini sudah ada empat putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji konstitusional pasal *a quo*, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, 72/PUU-XII/2014, 22/PUU-XVII/2019, dan 16/PUU-XVIII/2020. Di mana uji konstitusional pasal *a quo* terkait pengaturan tata cara pemanggilan notaris untuk kepentingan penyidikan dan pemeriksaan. Berdasarkan pertimbangan hukum keempat putusan *a quo*, terlihat jelas Mahkamah Konstitusi telah melakukan interpretasi teks-teks hukum. Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini dan dikarenakan pula objeknya adalah norma, dengan demikian teknik interpretasi dari isi norma tersebut adalah teknik yang paling sesuai untuk menjawab permasalahan. Yang pada akhirnya pula, kualitas penelitian hukum dapat diukur dari kualitas analisis konseptual, kualitas penalaran dan retorika, dan yang terakhir, kualitas referensi dalam teks. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keempat putusan *a quo* terlihat Mahkamah Konstitusi melakukan kegiatan interpretasi tekstual dan/atau meta-tekstual. Begitu pula, setelah diamati terdapat hubungan tidak langsung antara salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dengan perubahan Pasal

66 sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; sehingga terjaga pula kehormatan notaris dengan diperlukannya sikap kehati-hatian dari penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum terhadap notaris. Oleh karena itu pula keempat putusan *a quo* berbeda-beda amar putusannya, ada yang dikabulkan, tidak dapat diterima dan/ataupun ditolak.

(Iskandar Muda)

Kata kunci: jabatan notaris; interpretasi; undang-undang.

Ardiansyah (Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Balikpapan)

Penafsiran Hukum Tentang Pengikatan Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Surat Keterangan Tanah

Kajian Putusan Nomor 93/Pdt.Bth/2017/PN.Bpp

Jurnal Yudisial 2020 13(3), 289 - 309

Awal permasalahan yang dibahas dalam Putusan Nomor 93/Pdt.Bth/2017/PN.Bpp adalah akta pengikatan perjanjian jual beli yang ditandatangani pada saat satu hari setelah Putusan Nomor 78/Pdt.G/2013/PN.Bpp. Majelis hakim dalam amar putusan menyatakan bahwa pelawan adalah pembeli yang beriktikad baik serta menyatakan sah secara hukum dan mengikat bagi yang memiliki surat keterangan tanah yang dijadikan bukti dalam persidangan yang dibuat oleh asisten wedana. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan surat keterangan yang dibuat oleh asisten wedana tertanggal 20 September 1968 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan bagaimanakah penafsiran hakim dalam mengesahkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 65 dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 67. Metode

| | |
|--|---|
| <p>penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Kesimpulan dari penelitian ini adalah majelis hakim kurang cermat memahami perbedaan antara surat keterangan tanah dengan akta yang dibuat oleh PPAT sementara (camat) dan majelis hakim juga keliru jika surat keterangan tersebut hanya diketahui oleh asisten wedana tapi dalam faktanya surat keterangan tersebut dibuat oleh asisten wedana. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 78/Pdt.G/2013/PN.Bpp bahwa pengikatan jual beli antara turut terlawan dengan pelawan tidak ada iktikad baik dalam melakukan perbuatan hukum jual beli, karena menjual tanah yang masih dalam proses hukum di pengadilan.</p> <p style="text-align: right;">(Ardiansyah)</p> <p>Kata kunci: perjanjian pengikatan jual beli; iktikad baik; surat keterangan tanah.</p> | <p>hakim dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan analisis terhadap Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg. Hasil penelitian menunjukkan logika hukum yang dibangun oleh hakim yaitu logika hukum <i>indoktriner</i> dan <i>argumentum ad verecundian</i> sehingga perusahaan (PT BMH) dapat memenangkan perkara tersebut.</p> <p style="text-align: right;">(Muhamad Sadi Is)</p> <p>Kata kunci: kepastian hukum; perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; hukum lingkungan.</p> |
| <p>Is MS (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, Palembang)</p> <p>Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia</p> <p>Kajian Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2020 13(3), 311 - 327</p> <p>Kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab negara dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baik generasi masa kini dan masa depan yang dapat menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mencegah perusakan lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Akan tetapi undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum bisa memberikan kepastian hukum, sehingga menimbulkan konflik antara perusahaan dengan pemerintah seperti dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg. Penelitian ini menyoroti bagaimana kepastian hukum yang dibangun oleh</p> | <p>Pangesti S (Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang)</p> <p>Akta PKR dari RUPS Luar Biasa yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum</p> <p>Kajian Putusan Nomor 45/Pdt/2014/PTR</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2020 13(3), 329 - 350</p> <p>Penerbitan akta pernyataan keputusan rapat (PKR) dari penyelenggaraan rapat umum pemegang saham (RUPS) dilakukan untuk menjamin kepastian hukum telah diadakan RUPS dengan keputusan-keputusannya. Permasalahan muncul ketika akta PKR diterbitkan dari penyelenggaraan RUPS luar biasa yang mengandung perbuatan melawan hukum (PMH), sebagaimana RUPS luar biasa yang diselenggarakan PT ECO pada tanggal 21 Mei 2011, yang dipimpin komisaris utamanya yakni S. Fokus penelitian ini adalah akibat hukum dan langkah hukum yang ditempuh para pihak terhadap penerbitan akta PKR dari penyelenggaraan RUPS luar biasa yang mengandung PMH dengan pendekatan kasus terhadap Putusan Nomor 45/Pdt/2014/PTR. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerbitan Akta PKR Nomor 56 dari penyelenggaraan RUPS luar biasa PT ECO yang kemudian diproses ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,</p> |

| | |
|--|---|
| <p>menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak terkait yakni pemegang saham, pelaku PMH, dan notaris yang menerbitkan dan memproses akta PKR tersebut. Langkah hukum yang ditempuh para pihak terhadap penerbitan Akta PKR Nomor 56 tersebut telah diproses melalui jalur pengadilan yakni dari Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan terakhir di Mahkamah Agung.</p> <p style="text-align: right;">(Shinta Pangesti)</p> <p>Kata kunci: akta pernyataan keputusan rapat; rapat umum pemegang saham; perbuatan melawan hukum.</p> | <p>dan denda terhadap anak berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak relevan dijatuhkan kepada anak. Hal ini karena tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan integratif berdasarkan Pancasila, yang mengedepankan kepentingan masa depan anak dan mendasarkan pada nilai-nilai religius.</p> <p style="text-align: right;">(Warid Anjari)</p> <p>Kata kunci: anak; perlindungan; integratif; Pancasila.</p> |
| <p>Anjari W (Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta)</p> <p>Perlindungan Anak yang Bermasalah dengan Hukum dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Pancasila</p> <p>Kajian Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg dan 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2020 13(3), 351 - 372</p> <p>Penting bagi setiap anak Indonesia mendapatkan perlindungan dari negara. Tidak terkecuali anak yang bermasalah dengan hukum mendapatkan perlindungan sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, yang penjatuhan pidananya berdasarkan pada tujuan pemidanaan integratif Pancasila. Pemidanaan terhadap anak dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg dan 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw tidak berorientasi pada kepentingan terbaik anak dan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan integratif Pancasila. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada bagaimana perlindungan anak pada kedua putusan tersebut menurut perspektif pemidanaan integratif berdasarkan Pancasila? Metode penelitiannya menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat perlindungan anak dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg dan 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw karena penjatuhan pidana penjara</p> | <p>Arifai (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari)</p> <p>Menalar Keadilan Restoratif dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika dengan Terdakwa Anak</p> <p>Kajian Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2020 13(3), 373 - 390</p> <p>Tulisan ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi mengenai perkara tindak pidana narkotika vide Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diancam pidana tersebut sudah jelas dikategorikan sebagai anak di bawah umur. Namun dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan, sementara dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penjatuhan sanksi pidana terhadap anak semestinya menjadi upaya terakhir (<i>ultimum remedium</i>). Tulisan ini fokus mengkaji sejauhmanakah hakim mempertimbangkan asas kemanfaatan dan keadilan restoratif bagi pihak anak dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi. Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Kesimpulannya bahwa hakim lebih cenderung menitikberatkan pertimbangannya pada sisi kepastian hukum tanpa</p> |

| | |
|---|--|
| <p>lebih jeli lagi mendalami keadilan <i>restorative justice</i> dari putusan yang dijatuhkannya bagi diri terdakwa anak.</p> <p>(Arifai)</p> <p>Kata kunci: peradilan anak; narkoba; keadilan restoratif.</p> | <p>mekanisme <i>checks and balances</i> dalam proses peradilan pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi khususnya terhadap pengujian Pasal 109 ayat (1) KUHAP memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai kewajiban penyidik untuk menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam jangka waktu tujuh hari kepada penuntut umum. Putusan Mahkamah Konstitusi berimplikasi semakin diperkuatnya keterpaduan dalam sistem peradilan pidana antara subsistem kepolisian dengan subsistem kejaksaan.</p> |
| <p>Afrizal R (Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang)</p> <p>Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan</p> <p>Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2020 13(3), 391 - 408</p> <p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menguji Pasal 109 ayat (1) KUHAP tentang kewajiban penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum, terlapor, korban/ pelapor dalam jangka waktu tujuh hari. Putusan ini menegaskan bahwa pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum yang sebelumnya tanpa kepastian, sehingga sering terjadi surat pemberitahuan dimulainya penyidikan disampaikan secara bersamaan dengan berkas perkara dan koordinasi antara kedua lembaga penegak hukum baru terlihat pada saat itu. Permasalahan pada penulisan ini adalah bagaimanakah pertimbangan hakim konstitusi berkaitan dengan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana serta bagaimanakah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap sistem peradilan pidana terpadu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim konstitusi dalam putusannya menjelaskan bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP terdapat ketidakpastian mengenai koordinasi antara penyidik kepolisian dan penuntut umum. Ketidakpastian akan berpengaruh kepada</p> | <p>(Riki Afrizal)</p> <p>Kata kunci: sistem peradilan pidana terpadu; penyidikan; surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.</p> |

The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

Muda I (Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta)

Interpretation of Constitutional Court Related to Constitutional Review Article 66 Law of Notary Position

An Analysis of Constitutional Court Decision Number 49/PUU-X/2012, 72/PUU-XII/2014, 22/PUU-XVII/2019 and 16/PUU-XIII/2020 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2020 13(3), 267 - 288

There have been four decisions of the Constitutional Court regarding the constitutional review of the a quo article in constitutional review Article 66 of the Law on Notary Position, both in Law Number 30 of 2004 and its amendments, namely Law Number 2 of 2014. There are the Constitutional Court Decision Number 49/PUU-X/2012, 72/PUU-XII/2014, 22/PUU-XVII/2019, and 16/PUU-XVIII/2020. The constitutional review of the a quo article related to the arrangement of the procedures for summoning a notary is for investigation and examination purposes. Based on legal considerations, the four a quo decisions clarify that the Constitutional Court has interpreted legal texts. Normative legal research is used in this study because the object is the norm. Thus the interpretation technique of the norm contents is the most appropriate technique to answer the problem. The last thing, the quality of legal research can be measured from the quality of conceptual analysis, the quality of reasoning and rhetoric, and finally, the quality of references in the text. The study results reveal that the four a quo decisions are seen by the Constitutional Court conducting textual and/or meta-textual interpretation activities. After observing, there is an indirect relationship between one of the legal considerations of the Constitutional Court Decision Number 49/PUU-X/2012 with amendments to Article 66 as contained in Law

Number 2 of 2014. To maintain the notary honor, law enforcers need a cautious attitude in taking legal actions against notaries. Therefore, the four a quo decisions have different verdicts; some are granted, cannot be accepted, and/or rejected.

(Iskandar Muda)

Keywords: notary position; interpretation; law.

Ardiansyah (Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Balikpapan)

The Legal Interpretation of the Sale and Purchase Agreement Based on a Land Certificate

An Analysis of Decision Number 93/Pdt.Bth/2017/PN.Bpp (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2020 13(3), 289 - 309

The early issues discussed in Decision Number 93/Pdt.Bth/2017/PN.Bpp is agreement deed of sale and purchase agreement signed one day after the Decision Number 78/Pdt.G/2013/PN.Bpp. The panel of judges in the verdict stated that contrarian was a buyer who had good intentions and declared legally valid and binding to those who owned a land certificate that used as evidence in the trial prepared by assistant wedana. Does this research focus on how the judge's consideration in determining the certificate made by the assistant wedana dated 20th September 1968 was valid and had a binding legal force that appropriates with the applicable law in Indonesia and how the judge's interpretation in ratifying the sale and purchase Agreement Deed Number 65 and the Sale and Purchase Agreement Deed Number 67. The research method used in this paper is a normative juridical method with a case study approach. This research concludes that the panel of judges is less accurate in understanding the difference between the land certificate and the deed

| | |
|---|---|
| <p>made by the temporary PPAT (subdistrict). The panel of judges also has mistaken if the assistant wedana only knows the certificate. But the fact, not only knew but also assistant wedana created the certificate based on judge's consideration in Decision Number 78/Pdt.G/2013/PN.Bpp that the sale and purchase agreement between co-defendant and contrarian had no good intention in performing a legal act of buying and selling by selling the land that still in legal proceedings in court.</p> <p style="text-align: right;">(Ardiansyah)</p> <p>Keywords: sale and purchase agreement; good intention; land certificate.</p> | <p style="text-align: right;">(Muhamad Sadi Is)</p> <p>Keywords: legal certainty; environmental protection and management; environmental law.</p> |
| <p>Is MS (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, Palembang)</p> <p>Legal Certainty for Environmental Protection and Management in Indonesia</p> <p>An Analysis of Decision Number 24/Pdt.G/2015/PN.Plg (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2020 13(3), 311 - 327</p> <p>Legal certainty in environmental protection and management is the state's responsibility to utilize natural resources to provide maximum benefits for the people's welfare and life, both present, and future generations. It can guarantee citizens' rights to obtain a good and healthy living environment and prevent environmental destruction from exploiting natural resources. However, the law on environmental protection and management has not provided legal certainty, causing conflict between the company and the government, as stated in Decision Number 24/Pdt.G/2015/PN.Plg. This research highlights how the judge builds legal certainty in Decision Number 24/Pdt.G/2015/PN.Plg. The research method using juridical normative by reviewing the laws and regulations in the environmental sector and analyzing against Decision Number 24/Pdt.G/2015/PN.Plg. The results showed that the judges' legal logic was indoctrinal legal logic and argumentum ad verecundian so that the company (PT BMH) could win the case.</p> | <p>Pangesti S (Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang)</p> <p>Deed of Meeting Decision Declaration from the Extraordinary General Meeting of Shareholders that Contained Unlawful Acts</p> <p>An Analysis of Decision Number 45/Pdt/2014/PTR (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2020 13(3), 329 - 350</p> <p>The issuance of the deed of meeting decision declaration from the holding of the general meeting of shareholders ensured legal certainty has been held by a general meeting of shareholders with its decisions. The problem arose when the deed of meeting decision declaration was published from the extraordinary general meeting of shareholders that contained unlawful acts, as was the extraordinary general meeting of shareholders held by PT ECO on 21st May 2011, led by its chief commissioner, S. This research focuses on the legal consequences and legal steps taken by the parties towards the deed of meeting decision declaration issuance from the holding of the extraordinary general meeting of shareholders containing unlawful acts with a case approach to the Decision Number 45/Pdt/2014/PTR. This research is normative legal research with a case study approach. This study concludes that the issuance of the Deed of Meeting Decision Declaration Number 56 from the holding of the extraordinary general meeting of shareholders of PT ECO on 21st May 2011, which then processed to the Ministry of Law and Human Rights produces legal consequences for the related parties, namely shareholders, unlawful acts actors, and notary who issued and processed the deed of meeting decision declaration. All the parties that take legal steps regarding the issuance of the Deed of Meeting Decision Declaration Number 56 have been processed through court channels from the Batam</p> |

| | |
|---|---|
| <p>District Court, Pekanbaru High Court, and finally at the Supreme Court.</p> <p>(Shinta Pangesti)</p> <p>Keywords: deeds of meeting decision declaration; general meeting of shareholders; unlawful act.</p> | <p>(Warih Anjari)</p> <p>Keywords: children; protection; integrative; Pancasila.</p> |
| <p>Anjari W (Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta)</p> <p>Protection of Children with Legal Problems in the Perspective of Pancasila Integrative Criminal</p> <p>An Analysis of Decision Number 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg and 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2020 13(3), 351 - 372</p> <p>Every Indonesian child needs to get protection from the state. No exception children who have problems with the law receive protection under the Juvenile Criminal Justice System, where the imposition of the punishment is based on Pancasila integrative punishment's objective. Criminalization against children in Decision Number 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg and 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw is not oriented towards the child's best interests and is not compatible with Pancasila's integrative punishment objectives. Therefore, this research focuses on protecting children in both decisions according to the perspective of integrative punishment based on Pancasila. The research method used is normative juridical research with a case study approach. The results of this study concluded that there was no child protection in Decision Number 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg and 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw due to imprisonment and fines against children based on Article 81 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection is irrelevant to be imposed on children. It because it is not compatible with the purpose of integrative punishment based on Pancasila, which puts forward the child's future interests and bases on religious values.</p> | <p>Arifai (Fakultas Hukum Universitas Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari)</p> <p>Reasoning About Restorative Justice in a Narcotic Case Committed by Children</p> <p>An Analysis of Decision Number 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2020 13(3), 373 - 390</p> <p>This paper examines the Decision of the Kendari District Court Number 10/Pid.Sus-Anak /2018/PN.Kdi regarding the narcotics case vides Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The perpetrator of the crime of narcotics abuse threatened with this crime categorized as a minor. However, in the decision, the panel of judges sentenced to imprisonment for one year and six months, while in Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, imposing criminal sanctions against children should be the last attempt (ultimum remedium). This paper focus on examining how far the judges consider the principles of restorative benefit and justice for children in Decision Number 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi. The research in this paper is normative juridical law research with a study case approach. The conclusion that judges are more likely to focus their considerations on legal certainty without being more observant in exploring restorative justice from the decisions they give to the child defendants.</p> <p>(Arifai)</p> <p>Keywords: juvenile justice; narcotics; restorative justice.</p> <p>Afrizal R (Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang)</p> <p>Strengthening the System of Criminal Jurisdiction Through the Obligation to Submit the Notification of</p> |

Commencement of Investigation

An Analysis of Constitutional Court Decision Number 130/PUU-XIII/2015 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2020 13(3), 391 - 408

Constitutional Court Decision Number 130/PUU-XIII/2015 examines Article 109 paragraph (1) of the Criminal Code Procedure concerning the obligation to submit notification of the investigator's commencement by investigators to the public prosecutor, reported, victim/reporter within seven days. This decision confirms that the notification of the investigator's commencement to the public prosecutor was previously uncertain. It often happened that the notification of the investigator's commencement was delivered simultaneously with the case files, and coordination between the two law enforcement agencies was only visible at that time. This writing problem is how the constitutional judge considerations are related to legal certainty in the criminal justice system and the Constitutional Court Decision's implications on the integrated criminal justice system. The research method used is normative legal research with a case study approach. The results showed that the constitutional judge consideration in their decisions explained that the uncertainty was in Article 109 paragraph (1) of the Criminal Code Procedure regarding the coordination between police investigators and public prosecutors. Uncertainty will affect the checks and balances mechanism in the criminal justice process. The Constitutional Court's Decision regarding the review of Article 109 paragraph (1) of the Criminal Code Procedure provides clarity and legal certainty regarding investigators' obligation to submit a notification letter for the commencement of investigation within seven days to the public prosecutor. The Constitutional Court's Decision has implications for strengthening integration in the criminal justice system between the police subsystem and the prosecutors' subsystem.

(Riki Afrizal)

Keywords: integrated criminal justice system; investigation; notification of the investigator's commencement.